

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Montenegro merupakan negara yang berada di wilayah Balkan Barat, Eropa Timur yang berbatasan Langsung dengan Laut Adriatic, Italia, Serbia, Albania, Kroasia dan Bosnia. Montenegro merupakan negara pecahan Republik Yugoslavia namun telah memerdekakan diri pada 2006 melalui referendum yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Masyarakat Montenegro memiliki karakteristik etnis yang mirip dengan Serbia, Kroasia dan Slovenia, di mana negara-negara tersebut dulunya juga tergabung dalam Yugoslavia. Sebagai negara yang baru merdeka 11 tahun, Montenegro menunjukkan aspirasi yang kuat dalam partisipasinya di sistem internasional. Montenegro yang wilayahnya juga menjadi bagian dari Eropa memiliki tujuan untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, di mana Uni Eropa dan NATO merupakan Organisasi Pemerintahan Internasional resmi di wilayah Eropa dan Atlantik. Pada November 2005, Montenegro resmi tergabung sebagai calon anggota Uni Eropa hingga saat ini. Sementara itu, pada Desember 2015, Montenegro secara resmi diundang pada Pertemuan NATO dalam pembahasan aksesinya untuk bergabung dengan NATO.¹

Montenegro merupakan negara bekas komunis ke-13 yang akan bergabung dengan NATO. Pada tahun 1999, perluasan aliansi NATO yang dimulai dengan bergabungnya Polandia, Republik Ceko serta Hungaria kemudian disusul

¹ NATO : "Relations with Montenegro", http://www.nato.ints/cps/cs/natohq/topics_49736.htm (Diakses Pada 20 May 2017).

oleh Albania dan Kroasia pada 2009. Proses Montenegro sebagai kandidat negara anggota NATO terbilang dinamis dan signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang saat ini sama-sama terlibat dalam perluasan keanggotaan NATO. Diantaranya ialah Makedonia yang terhalang oleh permasalahan dengan Yunani, Ukraina yang sampai saat ini masih dipengaruhi Rusia dalam konflik di Krimea serta Georgia yang beberapa waktu lalu berada di bawah invasi Russia .

Peta 1.1
Peta Keanggotaan dan Anggota Potensial NATO di Wilayah Eropa.



Sumber : Members and NATO Enlargement,
<http://nato.md/en/membri-si-parteneri/>

Peta 1.1 di atas negara-negara yang ditandai dengan warna biru menunjukkan negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan NATO di wilayah Eropa. Negara-negara yang ditandai dengan warna oranye pada wilayah Balkan Barat, Montenegro, Bosnia serta Makedonia tergolong dalam kandidat negara anggota.

Sebagaimana dinyatakan dalam strategi pertahanan nasional Montenegro yang diadopsi pada Juni 2006,²

The strategy confirms Montenegro's commitment to undertake all necessary actions so as to meet the conditions for its integration into the Euro-Atlantic and other international security structures. In that context, the strategic goal of Montenegro is to become a full member of NATO and the EU in the Shortest possible time.

Ini menunjukkan kebijakan utama Montenegro dalam strategi keamanannya yaitu untuk dapat bergabung secara aktif dalam keanggotaan NATO serta menjadi negara anggota Uni Eropa. Montenegro telah aktif berpartisipasi dalam beberapa agenda NATO, terutama pada agenda *Partnership for Peace (Pfp)* yang pada umumnya merupakan agenda awal sebuah negara untuk bisa menjadi aliansi NATO.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) merupakan aliansi atau persekutuan dalam bidang keamanan yang dibentuk pada Desember 1991. Aliansi keamanan ini berkembang pada tingkat regional, yakni kawasan Eropa, Samudera Atlantik serta Balkan. Aliansi yang saat ini telah beranggotakan 28 negara tersebut menjanjikan stabilitas keamanan dalam aspek politik dan militer bagi negara anggota dan aliansinya.³ Dalam memperkuat tatanan aliansi dan keanggotannya, NATO memiliki misi perluasan keanggotaan, sebagaimana dinyatakan dalam situs resmi NATO : *"NATO membership is open to any other European state in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area."*⁴ Sesuai pernyataan di atas, keanggotaan NATO terbuka bagi setiap negara Eropa guna memperpanjang Prinsip-prinsip dari perjanjian dan

² DRAFT DEFENCE STRATEGY Montenegro. hal 2.

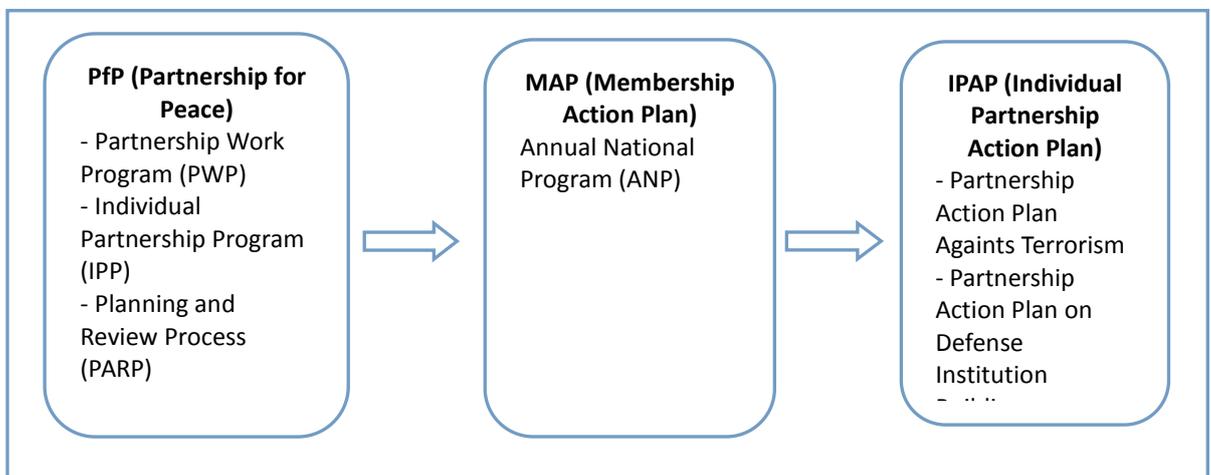
³ NATO: What is NATO? <http://www.nato.int/nato-welcome/index.html> (Diakses pada 16 Mei 2016).

⁴ Ibid.

berkontribusi bagi keamanan di wilayah Atlantis Utara.

Terkait dengan agenda perluasan tersebut, saat ini ada beberapa negara yang menjalin hubungan dengan NATO serta merupakan kandidat negara anggota NATO selanjutnya yakni, Montenegro, Makedonia, Geogia serta Ukraina.⁵ Namun negara-negara ini menjalani proses serta dinamika yang berbeda-beda untuk menuju keanggotaan NATO. Berikut ialah tahapan-tahapan dalam bergabung menjadi anggota NATO.⁶

Bagan 1.1 : Proses bergabung dalam keanggotaan NATO.



 Sumber : NATO handbook, “Partnership Work Program for 2000-01”, www.nato.int/docu/handbook/2001

Tahapan-tahapan tersebut merupakan progres yang akan dijalankan oleh negara mitra yang akan bergabung kedalam aliansi. Setiap tahapan memiliki kondisi tertentu. Tidak semua negara calon anggota dapat menjalankan tahapan tersebut dengan lancar dikarenakan tantangan dan ancaman-ancaman keamanan tertentu yang terjadi di tiap negara calon anggota.⁷

⁵ Biermann Rafael, “NATO Enlargement - Approaching a Standstill”. *The George C. Marshall European Center for Security Studies*, 2009, hal 1.

⁶ NATO handbook, “Partnership Work Program for 2000-01”, www.nato.int/docu/handbook/2001. (Diakses Pada 13 Juli 2017).

⁷ Mahmedin Tahirovic. *Montenegro and the NATO Partnership for Peace Program*, 2008. hal 43.

Montenegro menunjukkan progres yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara kandidat NATO lainnya. Hal ini terbukti dengan diundangnya Montenegro dalam pertemuan pembahasan aksesi⁸ untuk menjadi anggota ke-29 NATO pada 2 Desember 2015 lalu.⁹ Agenda ini dilaksanakan pada pertemuan Dewan Atlantik Utara pada tingkat Menteri Luar Negeri yang dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Montenegro dan Menteri Luar Negeri dan Integrasi Eropa Igor Lukšić.¹⁰

Keikutsertaan Montenegro dalam program tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen PfP oleh Presiden Montenegro, Filip Vujanovic pada 2006, tidak lama setelah kemerdekaannya.¹¹ Dalam memperkuat hubungannya dengan NATO, Montenegro ikut serta dalam program *Individual Partnership Action Plan* (IPAP) sejak tahun 2008 hingga 2010. Program ini dijalankan Montenegro sejalan dengan program *Membership Action Plan* (MAP) yang dimulai pada 2009. Tahap ini berhasil dicapai oleh Montenegro atas penilaian NATO terhadap negara ini sejak mereka memulai kesepakatan PfP di mana NATO menilai Montenegro memiliki nilai-nilai yang sama dengan negara-negara aliansi NATO terutama keberhasilan Montenegro dalam mewujudkan demokrasi yang diraih pada kemerdekaannya.¹²

Kerja sama NATO dan Montenegro berlanjut pada awal tahun 2010 di mana Montenegro ikut mengirim pasukan bersama dengan pasukan dari Kroasia

⁸ Menurut PBB, Aksesi merupakan aksi suatu negara sesuai perjanjian untuk melakukan pengikatan secara legal sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan tertentu.

⁹ NATO : Alliance invites Montenegro to start accession talks to become member of NATO. 2 Desember 2015. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125370.htm (Diakses pada 16 Mei 2016).

¹⁰ Ibid.

¹¹ NATO: Relations with Montenegro, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49736.htm (Diakses pada 16 Mei 2016).

¹² NATO : Alliance invites Montenegro to start accession talks to become member of NATO.

untuk ikut serta dalam operasi *International Assistance Force* (ISAF) di Afghanistan. Dalam operasi ini Montenegro mendonasikan lebih dari 1600 senjata dan 250.000 amunisi.¹³ Misi perdamaian ini dianggarkan oleh Montenegro sebanyak 2,5 juta Euro setiap tahunnya.¹⁴ Serta dengan total pengeluaran pertahanan pada 2010 yakni 40,3 juta Euro.¹⁵ Ini memberatkan Montenegro mengingat kapabilitas negara yang pada masa itu baru mencapai kemerdekaan kurang lebih empat tahun, hanya memiliki 2.500 hingga 3.000 personel militer serta pembiayaan yang terbatas.¹⁶ Hal inilah yang menimbulkan perdebatan dalam melihat pertimbangan bahwa Montenegro mengirim tentara untuk operasi perdamaian oleh NATO tidak akan mendatangkan keuntungan yang besar serta dampak yang nyata bagi keduanya mengingat tentara dan kekuatan militer negara-negara anggota NATO lainnya jauh lebih bergengsi.¹⁷

Perdebatan internal juga disebabkan oleh situasi perekonomian Montenegro.¹⁸ Walaupun Montenegro tergolong *middle income country*, namun sejak 2006 hingga 2016, hutang luar negeri Montenegro semakin meningkat. Berikut data hutang luar negeri Montenegro per-persentase GDP;¹⁹ Terhitung pada tahun 2006 sebesar 36,33%; tahun 2007 sebesar 31,05%; tahun 2008 sebesar

¹³ Ibid.

¹⁴ Tanjug, B92.net, Montenegro to keep troops in Afghanistan. http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2013&mm=06&dd=06&nav_id=86527. (Diakses pada 7 Maret 2017).

¹⁵ Global Security: Montenegro - Military Spending, <http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/me-budget.htm#> (Diakses pada 7 Maret 2017).

¹⁶ Global Security: Military of Montenegro, <http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/me-vojska.htm> (Diakses pada 18 Mei 2016).

¹⁷ Jelena Radoman. "Montenegrin debate on accession to NATO", *WBSO*, 2009, hal 7. https://www.researchgate.net/publication/260347624_Montenegrin_debate_on_accession_to_NATO (Diakses pada 17 Mei 2016).

¹⁸ Radoman. hal 6.

¹⁹ Montenegro National Debt, <http://countryeconomy.com/national-debt/montenegro> (Diakses Pada 30 Mei 2017).

32,08%; tahun 2009 sebesar 41,44%; tahun 2010 sebesar 43,70%; tahun 2011 sebesar 48,57%; tahun 2012 sebesar 56,87%; tahun 2013 sebesar 58,65%; tahun 2014 sebesar 63,36%; tahun 2015 sebesar 69,32%; dan tahun 2016 sebesar 71,32%. Hutang-hutang ini dipinjam dari Bank-bank Internasional seperti IBRD dan European Investment Bank.²⁰

Keinginan Montenegro untuk bergabung dengan NATO harus menunjukkan usaha dan reformasi yang serius di segala aspek seperti pertahanan, ekonomi, politik, dan lainnya. Indikasi yang kuat untuk bergabung ke dalam aliansi terbukti pada 6 Juni 2014, yakni kurang dua bulan dari *Wales Summit*,²¹ di mana pemerintah Montenegro menerima amandemen bagi Agensi Hukum Keamanan Nasional untuk memperbaiki kerangka legal dari badan yang bertugas dalam komitmen untuk bergabung dengan NATO.²² Pengeluaran sektor militer Montenegro pada tahun 2014 bernilai 1.51 % dari GDP,²³ mendekati target pengeluaran 2014 yakni 1,68% GDP.²⁴ Angka pengeluaran tersebut sama dengan angka yang dianggarkan oleh beberapa negara pendiri NATO, yakni Italia dan Norwegia.²⁵

Dalam potensi ekonomi, Montenegro tergolong negara dengan penghasilan menengah didukung dengan angka GDP 4.588 Milyar Dollar US serta

²⁰ Balkan Insight, Montenegro Debt Level Hits New Record, <http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-govt-debt-hits-new-peak> (Diakses Pada 30 Mei 2017).

²¹ Wales Summit merupakan pertemuan kepala negara dan kepala pemerintah negara anggota NATO yang diadakan di Newport, Wales pada 4 dan 5 September 2014. pertemuan ini membahas dan mendiskusikan isu-isu terkait serta yang menjadi pertimbangan bersama bagi aliansi serta perencanaan strategi dan aktifitas yang dapat direalisasikan oleh institusi kedepannya.

²² Peter Bator, 'Montenegro's way to the door of NATO', Slovak Atlantic Commission, hal 9.

²³ Index mundi, Montenegro - Military expenditure (% of GDP), <http://www.indexmundi.com/facts/montenegro/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS> (Diakses pada 6 Maret 2017).

²⁴ Bator. hal 11.

²⁵ SIPRI Military expenditure data: 1988-2015, Share of GDP. 2015.

populasi sebanyak 621,800 pada tahun 2014.²⁶ Pada reformasi anggaran keamanan, Montenegro akan meningkatkan pembiayaan dalam sektor pertahanan, mengulang kembali struktur perencanaan anggaran pertahanan termasuk 20% dari perjanjian modernisasi dan efektivitas ekonomi dalam sektor pertahanan.²⁷ Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kapabilitas untuk bergabung dengan aliansi.

NATO pada dasarnya telah membuka pintu bagi Montenegro sejak masa negara Uni Serbia dan Montenegro.²⁸ Negara pecahan Yugoslavia ini telah mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam rangkulan NATO melalui PfP. Namun NATO meragukan masa depan negara Uni Serbia dan Montenegro diakibatkan dominasi Partai Nasionalis Serbia pada pemilihan parlemen di akhir 2003,²⁹ serta mengingat sejarah pengeboman oleh NATO pada tahun 1999 dalam melawan Republik Federal Yugoslavia pada perang Kosovo. Peristiwa ini menewaskan lebih dari 2000 rakyat sipil serta kerusakan infrastruktur lainnya.³⁰

Operasi yang dikomandoi oleh beberapa negara anggota NATO tersebut menggunakan kekuatan militer tanpa sepengetahuan Dewan Keamanan PBB. Peristiwa pelanggaran kemanusiaan ini membawa Republik Yugoslavia melalui *International Criminal Tribunal for the for Yugoslavia (ICTY)* menghadapi NATO

²⁶ World Bank : Montenegro. <http://data.worldbank.org/country/montenegro> (Diakses Pada 20 Mei 2016).

²⁷ Bator. hal 9.

²⁸ Negara Uni atau Union State adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Negara Uni Serbia dan Montenegro merupakan bentuk Uni politik (political union) - Uni politik adalah negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Uni politik dapat disebut juga dengan uni legislatif. Berbeda dengan uni personil, masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan dan politik bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal.

²⁹ Centre for European Security Studies (CESS), "The Western Balkan Candidates for NATO Membership and Partnership", 2005, hal 91.

³⁰ "15 years on: Looking back at NATO's 'humanitarian' bombing of Yugoslavia", <https://www.rt.com/news/yugoslavia-kosovo-nato-bombing-705/> (Diakses pada 20 Mei 2016).

dalam *Mahkamah internasional (ICJ)*. *International Crisis Group (ICG)*³¹ mengasumsikan bahwa NATO sebaiknya tidak menerima Serbia dan Montenegro ke dalam Pfp hingga negara unit ini mencabut tuduhannya terhadap NATO dan bekerja sama penuh dengan ICTY terkait dengan tuntutan atas pemulihan serta rehabilitasi kembali Serbia dan Montenegro pascapengeboman oleh NATO.³²

Dorongan untuk menuju keanggotaan NATO pun berlanjut oleh Montenegro di bawah kepemimpinan Milo Djukanovic yang menjadi Presiden Republik Montenegro pada 15 Januari 1998 hingga 2002, kemudian terpilih menjadi Perdana Menteri Montenegro selama tiga periode hingga akhir 2016 lalu. Djukanovic merupakan Presiden Partai Demokrasi Sosialis (DPS) yang merupakan partai politik paling berpengaruh di Montenegro, terbukti dengan selalu memenangkan pemilihan umum di Montenegro.³³ Perwakilan partai ini mendominasi bangku Parlemen Montenegro. Mengadopsi kebijakan merupakan peran Parlemen yang menguasai legislatif. Bergabung dengan Uni Eropa dan NATO merupakan cita-cita Partai DPS selain terbebas dari rezim Milosevic pada masa Republik Federasi Yugoslavia.³⁴

Djukanovic mengajukan referendum pembebasan Montenegro dari negara Uni Serbia dan Montenegro dengan Referendum serta kampanye pro-NATO. Referendum ini mengindikasikan independensi Montenegro terlepas

³¹ International Crisis Group atau ICG merupakan organisasi independen yang bekerja untuk pencegahan peperangan pada wilayah yang berkonflik dan membentuk kebijakan-kebijakan yang bertujuan membangun perdamaian dunia melalui advokasi tingkat tinggi dimana organisasi ini mengirim tim analisis politik ke wilayah konflik. ICG akan memberikan laporan analisis, informasi-informasi serta rekomendasi kepada pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin dunia serta organisasi-organisasi pemerintahan.

³² Centre for European Security Studies (CESS). hal 92.

³³ Redenko Scekic & Zeljko Rutovic, Political Life in Montenegro in the Transition Period, Journal of Eurasian Studies, 2016. hal 255.

³⁴ Slobodnaevropa.org: Djukanovic: Russia is Meddling in Montenegro, <http://www.slobodnaevropa.org/content/djukanovic-russia-is-meddling-in-montenegro/27435598.html> (Diakses pada 16 Mei 2016).

dari pihak-pihak atau partai Pro-Serbia yang dekat dengan ide-ide Rusia.³⁵ Target dari kampanye untuk mendukung Montenegro menuju kemerdekaan dan menjadi anggota NATO ialah masyarakat miskin yang kurang teredukasi serta para wanita. Kampanye ini dipimpin oleh Partai Demokrasi Sosialis Montenegro dan Partai Sosial Demokrasi Montenegro yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan Montenegro. Hal ini membuktikan konstruksi pembentukan Montenegro sebagai negara baru dengan ide demokrasi yang berbeda pada masa Republik Yugoslavia dan berbanding lurus dengan nilai demokrasi negara-negara aliansi dan anggota NATO.

Sebagai respon dari kampanye untuk mendukung Montenegro bergabung dengan NATO, protes kemudian berdatangan dari pihak Pro-Serbia atau Pro-Rusia. Sebanyak, 86.5% dari penduduk Montenegro berpartisipasi dalam referendum yang dilaksanakan pada 21 Mei 2006 tersebut dan sebagai hasilnya 55,5% dari masyarakat yang ikut dalam pemilihan mendukung independensi Montenegro serta bergabungnya Montenegro bersama NATO.³⁶ Pemerintahan baru Montenegro pun menyusun Strategi Pertahanan Nasional tahun 2006, di mana kepentingan dan objektif keamanan Montenegro yakni berkontribusi kepada NATO seperti yang dinyatakan, “.....and by allowing the possibility of use of Montenegro’s territory, air and sea to support relevant missions undertaken by the UN, EU, OSCE or NATO”.³⁷ Montenegro mempercayai bahwa dengan bergabung kedalam sistem keamanan kolektif maka Montenegro dapat meraih garansi yang

³⁵ Naslovi.net: Campaign for Greater Support to NATO Membership, <http://www.naslovi.net/2009-01-09/e-novine/kampanjom-za-vecu-podrsku-uclanjenju-u-nato/990176> (Diakses pada 20 Mei 2016).

³⁶ OSCE Final Report : Republic of Montenegro Referendum on State-Status. (Warsaw: 2006) hal 2.

³⁷ Pemerintah Republik Montenegro, *Strategi Keamanan Nasional Montenegro*, Tahun 2006. hal 5.

kuat atas kedaulatannya serta mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan keamanan kedepannya.³⁸

Protes keras datang dari Rusia yang merasa telah dikhianati oleh Montenegro jauh sejak Montenegro melangkah untuk melepaskan diri dari negara Uni Serbia dan Montenegro yang merupakan aliansi bagi Rusia untuk wilayah Barat Balkan. Sesuai Pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengingatkan kembali hubungan kuat bilateral Montenegro dan Rusia serta dukungan-dukungan yang telah diberikan oleh Rusia kepada Montenegro. Kebijakan ini juga dianggap melawan sistem keamanan Euro-Aatlantis pada saat ini dan akan menimbulkan reaksi yang serius dari Rusia.³⁹ Tidak hanya itu, Rusia bisa saja akan menghentikan kerja sama di bidang ekonomi dan lainnya dengan Montenegro.⁴⁰

Perdebatan dan kritik terhadap perluasan keanggotaan NATO saat ini terus bertambah dan ditemukannya data terbaru yang menyatakan, dukungan masyarakat Montenegro terhadap keanggotaan NATO menurun 3,7% dibandingkan dengan penolakan yang menurun, yakni sebesar 5%.⁴¹ Hal menarik lainnya ialah Montenegro hanya butuh waktu kurang dari 10 tahun untuk meraih undangan dari NATO yang terhitung memiliki perkembangan yang cepat dibandingkan kandidat lainnya. Niat penuh serta komitmen Montenegro untuk

³⁸ Radoman. hal 2.

³⁹ Nationalia: Nine years after independence, Montenegro receives invitation to join NATO, <http://www.nationalia.info/new/10665/nine-years-after-independence-montenegro-receives-invitation-to-join-nato> (Diakses pada 18 Mei 2016).

⁴⁰ RBTH Indonesia: Mengapa Rusia Menentang Bergabungnya Montenegro ke dalam NATO?, http://indonesia.rbth.com/politics/2015/12/07/mengapa-rusia-menentang-bergabungnya-montenegro-ke-dalam-nato_548249 (Diakses pada 16 Mei 2016).

⁴¹ Ibid.

bergabung dalam NATO merupakan hal yang menarik bagi peneliti untuk mengangkat pembahasan ini menjadi sebuah penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Perdebatan terkait keinginan Montenegro untuk bergabung menjadi anggota NATO bermunculan dari dalam dan luar negaranya sendiri. Dari dalam negaranya terdapat golongan yang menolak ide Pemerintah Montenegro untuk bergabung dengan NATO karena hal tersebut dianggap bukanlah pilihan yang baik dan hanya akan merugikan negara mengingat Montenegro harus siap untuk berkontribusi dalam operasi militer NATO yang mengeluarkan dana yang tidak sedikit.⁴² Sementara dari luar negaranya, terdapat Rusia yang melihat tindakan Montenegro akan merusak hubungan bilateral Rusia dan Montenegro yang telah terjalin sangat lama, di samping kecemasan Rusia terhadap NATO yang dianggap menekan posisi Rusia dalam sistem keamanan Euro-Atlantis.

Di tengah perdebatan dan kritik yang telah dijelaskan sebelumnya, Montenegro tetap bersikeras untuk bergabung menjadi anggota NATO. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti alasan Montenegro bergabung dalam keanggotaan NATO.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti mengangkat pertanyaan penelitian yakni, *“Mengapa Montenegro bergabung menjadi anggota NATO ?”*.

⁴² Radoman. hal 4.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah untuk menjelaskan faktor-faktor bergabungnya Montenegro dalam keanggotaan NATO.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Mengetahui dinamika dan proses sebuah negara untuk bergabung dalam tatanan aliansi atau institusi internasional;
2. Memahami perilaku negara dalam mengambil suatu kebijakan;
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan sumber pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional dalam melihat keanggotaan sebuah negara dalam sebuah organisasi internasional.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan referensi dari beberapa tulisan yang mengkaji dan menganalisa bergabungnya Montenegro dalam keanggotaan NATO, kajian perilaku negara dalam mengambil kebijakan serta kajian yg relevan lainnya.

Pertama, peneliti menggunakan tulisan yang berjudul *Montenegrin debate on accession to NATO* oleh Jelena Radoman.⁴³ Tulisan ini menggambarkan fenomena perdebatan akses Montenegro untuk menjadi anggota NATO. Perdebatan yang masih berlanjut ini mengindikasikan ketiadaan konsensus pada kepentingan strategi negara yang masih muda serta pencapaian yang telah dilakukan. Berbeda dengan integrasi Montenegro dalam pencalonan menjadi

⁴³ Jelena Radoman, "Montenegrin debate on accession to NATO", *WBSO*, 2009. https://www.researchgate.net/publication/260347624_Montenegrin_debate_on_accession_to_NATO (Diakses pada 17 Mei 2016).

anggota Uni Eropa, keanggotaan NATO justru menjadi topik publik yang kontroversial. Secara garis besar, keanggotaan NATO tidak menggambarkan dengan jelas keuntungan langsung yang akan didapatkan oleh masyarakat Montenegro. Bagi masyarakat sendiri, sistem keamanan bersama dianggap tidak begitu signifikan.

Ada beberapa argumen publik Montenegro yang menentang terhadap keanggotaan NATO, yakni ;

1. Kebijakan untuk bergabung menjadi anggota NATO tidak terdapat adaptasi dari dokumen-dokumen kepentingan strategis serta objektif dari masa pemerintahan terdahulu.
2. Masih diperlukannya konstitusi baru yang lebih terstruktur serta hukum-hukum pada pertahanan.
3. Monopoli dari suatu partai dominan yang mempengaruhi kebijakan.
4. Pihak oposisi menginginkan keanggotaan NATO harus dinilai sesuai dengan analisa *cost-benefit*.⁴⁴
5. Adanya ancaman terhadap keamanan karena terdapat potensi penyerangan dan terorisme jika Montenegro bergabung dengan NATO.
6. Jika semua negara dalam wilayah Barat Balkan memutuskan untuk bergabung dalam aliansi maka dinilai akan sulit melihat pihak yang merupakan ancaman yang sesungguhnya bagi negara.
7. Kembali kepada ketakutan awal dimana diharuskannya tentara-tentara nasional dikirimkan dalam misi operasional NATO.

⁴⁴ Analisa cost-benefit merupakan salah satu elemen pengukuran dalam analisa kebijakan. Dalam analisa kebijakan Weimer dan Vinning, analisa cost-benefit merupakan model analisis yang didasarkan pada efisiensi dampak dari kebijakan. Model ini diambil dengan 4 tahapan yakni, dampak yang relevan, perhitungan moneter dampak tersebut, potongan variabel waktu dan resiko, serta kebijakan alternatif.

Dalam tulisan ini dijabarkan beberapa data survei masyarakat Montenegro terhadap komitmen pemerintah Montenegro untuk bergabung dengan NATO. Dengan data tersebut, tulisan ini akan mendukung penelitian ini dalam menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Tulisan ini berfokus pada perdebatan-perdebatan terhadap kebijakan luar negeri Montenegro untuk bergabung dalam NATO, sedangkan penelitian ini akan mengkaji alasan dari Montenegro dalam memutuskan kebijakan.

Tulisan kedua berjudul *Montenegro's way to the door of NATO* karya Peter Bator, Slovak Atlantic Commission.⁴⁵ Tulisan ini menjelaskan dan menggambarkan dinamika dari proses bergabungnya Montenegro. Berbagai aspek dijelaskan untuk menggambarkan elemen-elemen penting yang diharuskan bagi Montenegro agar perencanaan keanggotaan NATO dapat terwujud. Berawal dari kemerdekaan Montenegro pada 2006 yang merupakan awal langkah pasti Montenegro menuju keanggotaan NATO dan Uni Eropa. Hal ini sejalan dengan strategi keamanan yang dibentuk dengan objektif komitmen bagi Montenegro untuk mengikuti segala kondisi yang dapat menyesuaikan mereka untuk ber-integrasi ke dalam struktur Euro-Atlantis sebagaimana tercantum dalam strategi keamanan Montenegro tahun 2006. Namun tidak sedikit yang menganggap dinamika kebijakan perluasan NATO ini merupakan strategi dalam membendung pengaruh Russia.

Dalam tulisan ini disimpulkan bahwa Montenegro telah melangkah jauh dengan menyesuaikan orientasi kebijakannya. Keanggotaan NATO memang

⁴⁵ Peter Bator , 'Montenegro's way to the door of NATO', Slovak Atlantic Commission, 2007.

menyediakan lebih dari pertahanan kolektif serta Montenegro tidak cukup ‘kaya’ untuk bisa melengkapi kapabilitas untuk bertahan sendiri. Namun, NATO sendiri memiliki kondisi tertentu bagi calon negara anggota dimana negara tersebut sebaiknya memenuhi persyaratan dan perluasan harus berkontribusi terhadap keamanan aliansi.

Tulisan ini membantu peneliti dalam melihat indikator-indikator yang harus dipenuhi Montenegro untuk bergabung dengan NATO. Namun, dalam tulisan ini tidak ditemukannya asumsi-asumsi serta hipotesa yang dinilai melalui kacamata konseptual. Hal inilah yang membedakan tulisan ini dengan penelitian yang akan diteliti.

Tulisan ketiga berjudul *Montenegro and NATO: the likelihood of accession and its repercussions* karya Michael Drewett, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies (CGRS).⁴⁶ Tulisan ini secara garis besar menyiratkan bahwa dalam mewujudkan integrasinya terhadap NATO, Montenegro hendaklah menyasati tantangan domestik serta tekanan dari Rusia. Hal ini dikarenakan dapat menunda proses bergabungnya Montenegro menjadi anggota ke-29 aliansi.

Keuntungan yang dapat diraih Montenegro sebagai anggota NATO ialah dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan akan konflik dengan bekas bangsa Yugoslavia (Serbia). Hal ini juga terkait dengan kebijakan luar negeri Rusia yang saat ini memunculkan indikasi akan pemikiran *offensive-realist* dengan tujuan memaksimalkan kekuatan dibandingkan dengan keamanan. Sebagaimana disetujui oleh para scholar Hubungan Internasional terutama Waltz, bahwa kebijakan perluasan NATO pascaperang dingin memperparah dilema keamanan Rusia, dan

⁴⁶ Michael Drewett, *Montenegro and NATO: the likelihood of accession and its repercussions*, Centre for Geopolitics & Security in Realism Studies, (United Kingdom: 2015).

memunculkan tekanan-tekanan antara Rusia dan Barat.

Keanggotaan Montenegro akan memberikan nilai strategis dengan ditematkannya basis NATO di Pelabuhan Kotor, yang merupakan pelabuhan di Adriatik. NATO dapat mengontrol hampir keseluruhan pesisir Mediterania Utara dari Gibraltar hingga perbatasan Turki-Suriah. Sehingga dapat dikatakan bahwa posisi geografis Montenegro sangat menguntungkan dan memberikan kontribusi besar dibandingkan kapabilitas militernya.

Tulisan ini juga memuat beberapa kesimpulan berupa argumen akan hal-hal yang dapat menghalangi akses Montenegro untuk memasuki NATO di samping keuntungan bagi kedua belah pihak. Ini dapat membantu peneliti dalam menambahkan redaksi untuk menjawab pertanyaan penelitian yakni faktor-faktor yang menjadi nilai tambah serta sebaliknya bagi Montenegro di mata aliansi. Serta yang membedakan tulisan ini dengan penelitian ini ialah penggunaan konsep dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

Tulisan keempat yakni berjudul *Russia's Role in the Balkans - Cause for Concern?* Yang ditulis oleh David Clark dan Dr Andrew Foxall⁴⁷. Membahas mengenai kebijakan-kebijakan Rusia, instrumen-instrumen yang digunakan untuk memperkuat pengaruh Rusia dan implikasinya terhadap wilayah Balkan dan Eropa keseluruhan. Dimulai dengan menganalisis kebijakan luar negeri Rusia sejak tahun 2000 hingga situasi kepentingan Rusia di wilayah Balkan.

Tercantum dalam konsep kebijakan luar negeri Federasi Rusia tahun 2013, wilayah Balkan merupakan strategi yang penting bagi Rusia, termasuk perannya sebagai penghubung transportasi dan infrastruktur cadangan gas dan

⁴⁷ David Clark, Dr Andrew Foxall, "Russia's Role in the Balkans - Cause for Concern?", *The Henry Jackson Society*, 2014.

minyak menuju negara-negara Eropa. Sejatinya sejak abad ke-18, strategi utama di wilayah ini ialah mengamankan akses ke Mediterania dari Laut Hitam dengan membangun kontrol Ottoman di selat tersebut (Bosphorus dan Dardanelles). Wilayah Balkan juga menjadi lahan penting bagi Rusia dalam pertarungan melawan berdiri dan berkembangnya norma-norma internasional yang diinginkan oleh Barat dan membatasi peningkatan pengaruh institusi-institusi barat. Duta Besar Rusia untuk Serbia bahkan menyatakan bahwa perluasan NATO di wilayah Balkan merupakan “garis merah” bagi Moscow.

Tulisan ini menurut peneliti akan dapat membantu memberikan gambaran terhadap salah satu faktor eksternal yang terkait terhadap kajian ini. Pembahasan yang berfokus terhadap pengaruh Rusia merupakan hal yang membedakan tulisan ini dengan penelitian yang diteliti, dimana pengaruh Rusia hanya menjadi salah satu faktor dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Tulisan kelima berjudul *Montenegro's Foreign Policy* oleh Jelena Dzankic.⁴⁸ Tulisan ini menjelaskan secara ringkas mengenai kebijakan luar negeri Montenegro beserta dinamikanya. Jelena membagi kebijakan luar negeri Montenegro dalam beberapa fase yakni; 1) kebijakan luar negeri Montenegro terhadap Serbia selama Yugoslavia sebelum 1992; 2) kebijakan luar negeri dalam masa pertentangan Montenegro terhadap Milosevic yakni 1997 hingga 2001; 3) kebijakan luar negeri Negara Unit Serbia dan Montenegro pada 2002 hingga 2006; 4) kebijakan luar negeri pascakemerdekaan yakni 2006 hingga saat ini.

Kebijakan luar negeri Montenegro secara garis besar dari pascakemerdekaan hingga saat ini ialah; 1) transformasi politik-politik internal

⁴⁸ Jelena Dzankic, "Montenegro's Foreign Policy", European International Studies Association. 2014.

terkait dengan konteks integrasi terhadap Uni Eropa; 2) keanggotaan NATO; 3) kerjasama regional, terutama dengan Serbia (*vis-a-vis*); 4) kebutuhan akan keseimbangan orientasi barat dengan pengaruh Rusia dalam politik luar negeri Montenegro.

Tulisan ini merupakan salah satu tulisan yang menjadi komponen penting bagi peneliti dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, karena terdapat data-data yang signifikan serta penulis membahas kajiannya tanpa melihat dari kacamata teori tertentu sehingga ini akan membedakan dengan penelitian ini. Namun tulisan hanya memberikan gambaran kebijakan luar negeri Montenegro. Sehingga berbeda dengan penelitian ini dimana fokus terhadap kebijakan integrasi menuju NATO.

1.7 Kerangka Konseptual

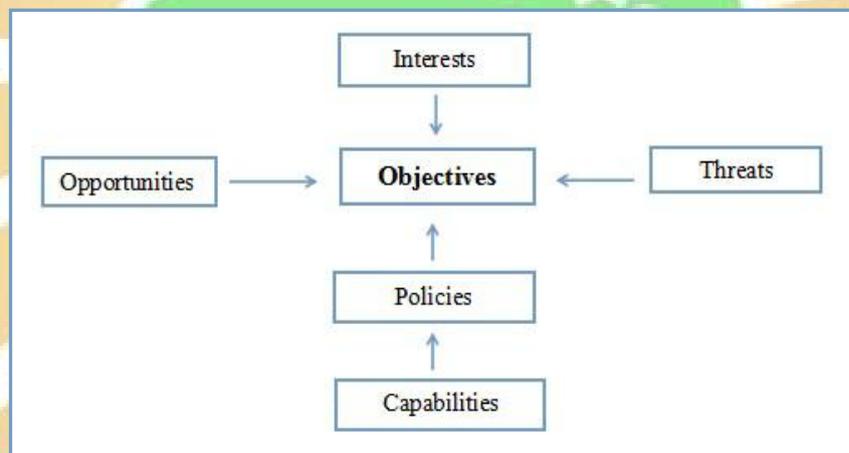
1.7.1 Konsep *State Behaviour* (Perilaku Negara)

Dalam mengkaji Analisa Kebijakan Bergabungnya Montenegro Dalam Keanggotaan NATO, peneliti akan menganalisa menggunakan konsep *state behaviour* (perilaku negara) oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi.⁴⁹ Konsep Perilaku Negara menjabarkan perilaku negara dalam mengambil suatu kebijakan. Perilaku tersebut ialah faktor-faktor yang dirumuskan oleh negara. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi negara dalam mengambil suatu kebijakan. Rangkaian faktor-faktor tersebut dikonseptualisasikan oleh Viotti dan Kauppi melalui *state behaviour*. Konsep ini dilihat dalam dua alasan utama yakni; (1) pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai faktor-faktor dalam membuat

⁴⁹ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, Fifth Edition, Pearson, USA, 2012, hal 187.

kebijakan (*policies*), yakni; kepentingan (*interests*), tujuan (*objectives*), ancaman (*threats*), dan kesempatan (*opportunities*) dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya; (2) kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi pembuat kebijakan suatu negara, namun juga praktisi-praktisi dalam organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-keperintahan internasional. Konsep ini dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 1.2 : State Behaviour



Sumber : Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations and World Politics*, Fifth Edition, Pearson, USA, 2012, hal 187.

Kebijakan (*policies*) yang diambil oleh para pembuat kebijakan sesuai dengan tujuan nasional (*objectives*) dan kepentingan nasional (*interests*). Kepentingan dasar dan mutlak dari sebuah negara ialah terlindunginya integritas fisik negara, sementara tujuan spesifik ialah mempertahankan kedaulatan dari ancaman dari luar yang datang. Dalam sistem internasional, terdapat peluang-peluang (*Opportunities*) yang harus ditanggapi oleh pemimpin negara dan pembuat kebijakan yang berguna dalam mencapai tujuan nasional. Demikian juga dengan ancaman (*threats*) yang mengancam tercapainya tujuan nasional. Pemanfaatan peluang-peluang dan tindakan terhadap ancaman akan menggunakan

faktor-faktor kekuatan nasional dan kemampuan-kemampuan (*capabilities*) yang dimiliki.

a. Tujuan (*Objectives*)

Tujuan nasional yang diperjuangkan oleh pembuat kebijakan biasanya lebih sederhana dan tidaklah rumit. Tujuan tersebut ialah untuk *defense* atau bertahan dalam melawan serangan. Tujuan-tujuan tersebut terbagi dalam bentuk; (a) *short term*, dibuat dalam keadaan yang mendesak dan hanya dalam jangka waktu yang singkat; (b) *middle range*, tujuan yang tidak mendesak namun penting bagi negara; (c) *long term*, sangat tidak mendesak dan membutuhkan jangka waktu yang panjang.

b. Kepentingan (*Interests*)

Pembuat kebijakan akan selalu berusaha untuk mengejar dan mempertahankan kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat dibagi dalam tiga hal; (1) *survival*, yakni bagaimana negara menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara. Kedaulatan tersebut dalam praktisnya berupa yuridiksi, *power*, otoritas internal dan eksternal; (2) *economic vitality and prosperity*, kejayaan ekonomi sangat penting bagi sebuah negara tidak hanya untuk masyarakatnya namun juga sebagai sumber *power* dalam politik internasional; (3) *core value*, merupakan nilai inti bagi masyarakat sebuah negara.

c. Ancaman (*Threats*)

Tujuan (*objektif*) secara kritikal dipengaruhi oleh ancaman (*threats*) yang diterima yang muncul dari sistem internasional. Cara sederhana dalam

memahami ancaman ialah dengan mempertanyakan, “apakah keinginan-keinginan dan kemampuan (*capabilities*) dari negara lawan?” jika sebuah negara memiliki keinginan untuk melakukan penyerangan, namun tidak memiliki kemampuan, maka ancaman akan bersifat rendah. Sebaliknya dengan negara yang memiliki kemampuan yang besar, namun tidak memiliki keinginan untuk melakukan penyerangan, maka ancaman juga akan rendah.

d. Peluang (*Opportunities*)

Sistem internasional tidak hanya menimbulkan ancaman bagi kepentingan nasional, namun juga adanya peluang-peluang (*opportunities*) yang dapat mempengaruhi formulasi dari kebijakan luar negeri. Peluang yang digunakan oleh suatu negara dapat membantu mencapai tujuan nasional dan kebijakan.

e. Kemampuan (*Capabilities*)

Pembuat kebijakan dapat mengkaji dan menjabarkan kebijakan luar negeri yang ingin mereka capai, namun negara harus memiliki kemampuan (*capabilities*). Bagi para pembuat kebijakan, *power* sangat terikat dengan kemampuan, begitu juga sebaliknya. Berikut elemen-elemen kemampuan yang ideal bagi negara;

1) Kemampuan politik (*Political capabilities*)

Faktor-faktor yang dilihat dari kemampuan politik negara ialah; sumber daya manusia, teknologi, reputasi, serta sifat alami dari sistem politik dan budaya politik.

Beberapa faktor atau keseluruhan dapat saling mempengaruhi efektivitas dari implementasi kemampuan materiil.

2) Kemampuan sosial dan budaya (*Social and Cultural capabilities*)

Kohesi sosial dari masyarakat memiliki dampak langsung pada posisi kekuatan.

Aspek penting lainnya dari kemampuan budaya ialah perpanjangan di mana negara mampu menjaga pengaruh terhadap negara lain melalui kesamaan bahasa, kepercayaan, etnik atau identitas ras, atau tradisi politik legal. Sosial dan budaya yang ditunjukkan dalam sistem internasional dapat menjadi sumber yang signifikan bagi kekuatan negara.

3) Kemampuan geografi dan ekonomi (Geographic and Economic capabilities)

Geografis dapat dinilai dari sumber daya alam, dan dampak penting pada kemampuan ekonomi negara. Peningkatan nilai perekonomian dapat diperoleh dari sumber daya alam yang menjadi sumber materiil.

4) Kemampuan militer (Military capabilities)

Bagi realis, militer merupakan kemampuan penting serta komponen dari kekuatan negara. Pertumbuhan yang cepat dari teknologi militer, khususnya persenjataan nuklir telah menjadi standar dalam kemampuan militer. Kemampuan militer bergantung pada kekuatan ekonomi sebagai sumber bagi personel militer. Ekonomi berguna dalam memenuhi peralatan dan persediaan militer. Dalam elemen ini, kemampuan ekonomi dapat menentukan batas dari kemampuan militer yang dipilih oleh pembuat kebijakan untuk dikembangkan.

Konsep *state behaviour* yang menjabarkan rangkaian-rangkaian serta faktor-faktor dalam melihat tujuan nasional sebagai kebijakan luar negeri, akan digunakan untuk menjelaskan perilaku Montenegro untuk tetap berkomitmen mewujudkan keanggotaan NATO walaupun mendapatkan kritik dan protes dari dalam dan luar negerinya. Sesuai dengan rangkaian yang telah didesain oleh Viotti dan Kauppi, peneliti akan menjelaskan masing-masing elemen tersebut sesuai

dengan kondisi Montenegro (kepentingan, tujuan, ancaman, peluang, dan kemampuan) dalam mengambil kebijakan untuk bergabung dengan NATO.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data yang didapatkan dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu fenomena.⁵⁰ Sedangkan jenis penelitian dalam menjelaskan Analisa Kebijakan Bergabungnya Montenegro Dalam Keanggotaan NATO ialah penelitian analisis, Dalam eksplanatif analisis, penelitian dilakukan dengan cara mengkaji fenomena yang diangkat dengan lebih rinci melalui pendeskripsian ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok, organisasi maupun negara.⁵¹ Sehingga dalam melakukan proses pendeskripsian secara kualitatif ini membutuhkan kemampuan peneliti untuk menginterpretasikan data sesuai dengan pendirian teoritis peneliti serta kaidah alamiah dalam membangun argumen hasil penelitian.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam mengkaji penelitian ini, batasan permasalahan untuk menjelaskan Analisa Kebijakan Bergabungnya Montenegro Dalam Keanggotaan NATO dilihat dari tahun 2006, di mana Montenegro memisahkan diri dari negara Uni Serbia dan Montenegro, kemudian mengubah kebijakan luar negeri hingga tahun 2016 di

⁵⁰ Catherine Marshall, Gretchen B Rossman, *Designing Qualitative Research 2nd Edition*, (California:1994, Sage Publication) hal 41.

⁵¹ Ibid.

mana Montenegro diundang secara resmi menjadi anggota ke-29 NATO. Tahun 2006 hingga 2016 Montenegro berada dibawah kepemimpinan Milo Djukanovic sebagai Perdana Menteri selama 3 periode.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis (variabel dependen) merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis. Variabel ini merupakan akibat dari kekuatan dan pengaruh dari variabel lain.⁵² Variabel yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa (variabel dependen) disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Variabel independen lebih dahulu terjadi daripada variabel dependen. Secara umum variabel independen disebut sebagai variabel yg mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.⁵³ Tingkat analisa merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam Studi Hubungan Internasional membantu di tingkat mana analisa dalam penelitian ini akan ditekankan.⁵⁴ Unit analisis dari penelitian ini ialah analisa kebijakan negara Montenegro, kemudian tingkat analisis dari kajian ini ialah negara.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dikaji dengan cara pengumpulan data. Dalam upaya pengumpulan data, terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan teknik menghubungkan teori dengan data-data yang diperoleh dengan melalui riset kepustakaan (*library*

⁵² Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Yogyakarta, 1990, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada), hal 108.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid. hal 5.

research). Data-data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari situs resmi atau laporan resmi NATO, situs resmi pemerintah atau laporan resmi pemerintah Montenegro, dan institusi resmi terkait lainnya. Sedangkan data sekunder menggunakan berbagai jurnal sebagai sumber rujukan utama dan data-data dari sumber lain, seperti buku teks, majalah, surat kabar, bulletin, hingga halaman internet yang terpercaya dan relevan dengan penelitian.

1.8.5 Teknis Analisa

Data yang telah didapatkan dari berbagai sumber diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan serta dikorelasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian dianalisa menggunakan konsep *state behaviour* oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian. Pada bab ini penjelasan permasalahan utama kajian ini digambarkan keseluruhan.

BAB II Konstelasi Keamanan di Wilayah Eropa Timur

Bab ini menjelaskan dinamika dan isu-isu keamanan di wilayah Eropa Timur dan wilayah Barat Balkan secara khususnya, serta aktor-aktor yang mempengaruhinya.

BAB III Hubungan Montenegro dan NATO

Bab ini menggambarkan keadaan negara Montenegro serta kebijakan luar negeri Montenegro dalam beberapa tahap yakni: 1) pada masa Negara unit Serbia dan Montenegro (2002-2006); 2) kebijakan pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan hubungan Montenegro dan NATO mulai dari kerjasama dan hubungan diplomatis hingga NATO mengundang Montenegro secara resmi untuk bergabung menjadi negara anggota aliansi selanjutnya. Dinamika lainnya yang juga menggambarkan terdapat kepentingan Montenegro terhadap NATO.

BAB IV Analisa Kebijakan Bergabungnya Montenegro Dalam Keanggotaan NATO

Bab ini menjelaskan Analisa Kebijakan Bergabungnya Montenegro Dalam Keanggotaan NATO yang dilihat dari kacamata konsep dan teori yang digunakan. Fokus pada bab ini ialah korelasi dari kebijakan Montenegro dengan diterimanya Montenegro sebagai negara anggota serta menjawab pertanyaan penelitian mengapa Montenegro bergabung dalam keanggotaan NATO.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap kajian penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

